

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut peneliti ICW (*Indonesia Corruption Watch*) banyak terjadi korupsi dana desa dikarenakan tidak ada sistem yang dilaksanakan secara komprehensif atau dibuat oleh pemerintah untuk mengontrol dana desa. Menurut ICW (*Indonesia Corruption Watch*), banyak faktor penyebab terjadinya korupsi di sektor desa antara lain kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian anggaran desa, kelembagaan desa yang kurang optimal seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kompetensi kepala desa yang terbatas, dan biaya politik yang tinggi dalam pemilihan kepala desa (ICW, 2018).

Pemerintah desa adalah tingkat terkecil yang bertugas untuk membantu pemerintahan pusat dan berhubungan langsung pada pengabdian masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, kepala desa dan perangkat desa diwajibkan untuk menjalankan tugas pemerintah desa dengan baik dan benar sehingga kesejahteraan masyarakat terpenuhi. Pemerintah desa diwajibkan untuk lebih teliti dalam pengelolaan pemerintah dan sumber dayanya, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dana desa dan kapasitasnya (Juardi et al., 2018).

Pemerintah desa wajib untuk melaporkan tanggung jawab atas penggunaan sumber pendapatan desa dalam laporan yang terealisasi pada

pelaksanaan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) dan laporan pertanggung jawaban yang terealisasi harus sesuai dengan yang telah ditentukan serta standar akuntansi desa yang masih berlaku. Laporan yang dihasilkan harus tepat waktu dalam kurun waktu yang telah ditentukan sebagaimana laporan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah pusat maupu masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa diharuskan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa, dimana segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan semestinya, sehingga dapat membentuk tata kelola pemerintahan desa dengan baik dan benar (Wiguna et al., 2017).

Akuntabilitas adalah bentuk hasil pertanggungjawaban yang berkaitan dengan kegiatan yang akan atau telah dilaksanakan sebagai jalan pemerintah desa untuk menyampaikan laporan kepada masyarakat. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan keuangan akan tetapi memberikan informasi mengenai perspektif ekonomi, politik dan sosial. Masyarakat memiliki tuntutan untuk pemerintah terhadap akuntabilitas. Namun pemerintah desa kerap melalaikan karakteristik akuntabilitas dalam mengelola dana desa (Karlinayani & Ningsih, 2018).

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah aplikasi yang digunakan desa untuk penganggaran, pengelolaan dan pelaporan keuangan desa. Sistem Keuangan Desa secara otomatis menghasilkan laporan yang dibutuhkan untuk menghemat waktu, biaya, membantu menggabungkan

data dan mengurangi kecurangan ataupun kesalahan. Sistem Keuangan Desa tidak hanya berbasis online, tetapi juga dibuat secara offline atau manual dengan mempertimbangkan potensi sumber daya desa yang ada dan kondisi tiap daerah yang berbeda. Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mengacu pada keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa (Rivan & Maksum, 2019).

Dengan adanya aplikasi SISKEUDES diharapkan dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah daerah dan dapat menciptakan prestasi dalam penerapan SISKEUDES di tiap desa dengan menghasilkan laporan-laporan yang diperlukan sehingga dapat menghemat waktu dan meminimalisir potensi kecurangan maupun kesalahan pada saat penginputan. Sedangkan, kenyataan berbeda menurut data dari ICW menunjukkan bahwa ada 46 kasus korupsi pada sektor anggaran desa dari 271 kasus penyalahgunaan di tahun 2019. Dari pantauan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) kurang lebih ada 330 pada sepanjang tahun 2021 (Ramadhan & Erdianto, 2020).

(Widagdo et al., 2020) menyebutkan dalam hasil penelitiannya salah satu faktor penyebab semakin tinggi potensi korupsi pada dana desa adalah kurangnya pemahaman akuntansi. Maka dari itu, pelatihan akuntansi harus mempertimbangkan bahwa akuntansi berperan dalam pengelolaan keuangan, khususnya dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah dan desa. (Sayyida & Riharjo, 2020) juga menyebutkan bahwa kemampuan sumber daya manusia dalam memahami akuntansi

adalah faktor penting dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya penerapan akuntansi yang baik dan benar diharapkan pemahaman pengelola dapat membuat pelaporan dilakukan dengan baik dan benar sehingga tidak terjadi kendala dan masalah.

Sebelum adanya Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pemerintah desa menyiapkan anggaran dan pembukuan pelaporan keuangan menggunakan Microsoft Excel ataupun aplikasi lain dengan format yang tidak standar. Pengelolaan secara manual dinilai masih belum efisien, salah satunya laporan keuangan yang terlalu lama penyelesaiannya dan melebihi batas waktu pelaporan ke negara. Hal ini menyulitkan pemerintah kota atau kabupaten untuk menganalisis APBDes dan laporan keuangan desa sehingga setelah peluncuran aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pemerintah merasa bahwa penggunaan aplikasi tersebut dapat membantu agar lebih mudah dan efisien. Pada penelitian (Rozita & Anita, 2020) menyatakan bahwa kendalanya adalah saat masih menggunakan aplikasi manual memakan banyak waktu untuk menyelesaikan tugas karena harus manual dan detail sehingga jika muncul kesalahan harus memeriksa ulang dari awal.

Berdasarkan penelitian (Malahika et al., 2018) mengatakan bahwa pelaksanaan sistem keuangan desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur operasional SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan dalam empat tahapan yaitu, perencanaan, penyelenggaraan, penatausahaan dan pelaporan. Tetapi, masih adanya masalah pada penerapannya karena sering

terjadi eror saat peginputan atau adanya beberapa laporan yang tidak terinput ke sistem dan masih menggunakan laporan secara manual.

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian (Assyahri & Vaguita, 2019) menyatakan bahwa penggunaan aplikasi SISKEUDES cukup baik dari segi efektif, efisiensi dan kesesuaian pada tahap perancangan dan pelaksanaan serta pada tahap pelaporan dan akuntabilitas masih belum efektif. Masih adanya kendala dalam pelaksanaannya termasuk kurangnya sumber daya manusia, belum maksimalnya pelatihan dari pihak kabupaten, keterlambatan dalam menghasilkan laporan pertanggungjawaban.

SISKEUDES merupakan hal yang penting dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga diharapkan melalui penerapannya dapat membawa perubahan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih baik di masa yang akan datang dan dapat menjadi solusi bagi perangkat desa dalam mengelola keuangan desa secara lebih akuntabel yang sesuai dengan tujuan penerapan aplikasi.

Sedangkan dalam penelitian (Martini et al., 2019) menemukan penerapan aplikasi SISKEUDES belum optimal. Sumber daya manusia menjadi faktor yang paling berperan pada hal ini. Kurang pahamnya perangkat desa yang berperan dalam pengoperasian SISKEUDES. Perangkat desa masih sering lupa pada tahap-tahap saat peginputan data. Perangkat desa masih merasa sulit pada pengoperasian SISKEUDES karena kurangnya pengetahuan tentang anggaran desa dan perangkat desa merasa

bingung saat melakukan penginputan data APBDes dalam aplikasi SISKEUDES.

Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto telah menggunakan aplikasi SISKEUDES sejak tahun 2017. Sistem ini membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan hingga ke tahap pertanggungjawaban keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum sistem keuangan desa ada, kepala desa Banjaragung menyiapkan laporan keuangan menggunakan sistem tersebut dengan manual atau menggunakan Microsoft Excel. Namun, cara ini dinilai kurang efektif dan efisien untuk menyusun laporan keuangan.

Mekanisme atau aturan pelaporan keuangan SISKEUDES yang berubah terutama terkait pada penempatan akun dan perubahan pada pembaharuan aplikasi setiap tahunnya. Meskipun dilakukan adanya pelatihan ulang, tampaknya tidak efektif karena operator mulai menguasai versi lama dan kemudian adanya kembali perubahan tersebut. Oleh karena itu, penerapan SISKEUDES tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang baik, koneksi internet yang baik dan juga kerjasama dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Melihat dari adanya beberapa permasalahan, oleh karena itu hal ini masih menjadi indikasi atau potensi untuk ditemukan dalam proses akuntabilitas keuangan desa. Dengan melihat adanya perbedaan hasil

penelitian terdahulu yang berbeda-beda, peneliti perlu mengkaji ulang terkait penerapan siskuedes untuk mendapatkan informasi lebih luas untuk mengetahui peran SISKEUDES dalam meningkatkan akuntabilitas desa Banjaragung. Berdasarkan latar belakang di atas dengan adanya masalah tersebut peneliti melakukan penelitian tentang “Analisis Penerapan Sitem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini menjadi sebagai sumber informasi dan referensi dalam penelitian selanjutnya agar menambah wawasan lebih luas dan pengembangan penelitian terikait sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas.

2. Bagi Mahasiswa

Sebagai pengetahuan agar nantinya sistem keuangan desa bisa lebih banyak yang mengetahui dan tidak hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja.

3. Bagi Universitas Muhammadiyah Surabaya

Untuk dijadikan sebagai landasan perubahan yang lebih baik bagi pihak yang berkepentingan di dalam dunia pendidikan dan dapat memberikan tambahan referensi